

---

# PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN *RETURN ON EQUITY* SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA SEKTOR JASA DI BURSA EFEK INDONESIA

Dedy Raynardi

email: dedy.raynardi@gmail.com

Program Studi Akuntansi STIE Widya Dharma Pontianak

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel *corporate governance*, berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak dengan *return on equity* sebagai variabel kontrol pada sektor jasa di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode pengujian hipotesis. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan studi dokumenter. Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi parsial, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis melalui uji F dan uji t. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan *return on equity* sebagai variabel kontrol, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dengan menggunakan *return on equity* sebagai variabel kontrol. Saran kepada calon peneliti sektor jasa agar mengukur variabel GCG dengan menggunakan *Corporated Governance Perception Index* (CGPI).

**KATA KUNCI:** *Good Corporate Governance*, Manajemen Pajak, Profitabilitas.

## PENDAHULUAN

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, perusahaan akan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, dan akan mempengaruhi arus kas perusahaan, serta karena sifat dari pajak yaitu tidak memberikan balas jasa secara langsung maka kebanyakan perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka.

Dalam melakukan manajemen pajak harus ada kerjasama yang baik dari dalam perusahaan berupa komitmen dari setiap unsur dimana kebijakan perpajakan yang diambil nantinya juga merupakan bagian dari *corporate policy* perusahaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap jajaran manajemen, mulai dari *top management* hingga ke *lower management* karena ini berdampak pada pencapaian perusahaan yakni *net profit after tax*. *Corporate policy* perusahaan sangat tergantung kepada *Corporate Governance* perusahaan.

Sedangkan untuk memastikan hasil uji tidak bias digunakan ROE sebagai variabel kontrol karena ketika suatu perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut

---

dapat di kompensasikan ke periode pajak setelahnya. Untuk dapat memastikan pajak yang akan dibayar tidak bias dikarenakan adanya kompensasi pajak tangguhan ini peneliti menggunakan ROE untuk mengontrol hasil penelitian.

## **KAJIAN TEORITIS**

Manajemen pajak dalam perusahaan berguna untuk menghemat biaya khususnya biaya pajak di dalam perusahaan guna memaksimalkan *earning after tax* di dalam perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan perusahaan.

Menurut Pohan (2011: 8):

“Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakan agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.”

Dalam melaksanakan manajemen perpajakan harus disusun sebuah perencanaan pajak yang biasa disebut dengan *tax planning* dimana,

Menurut Pohan (2011: 9):

“*Tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”

Sedangkan dalam menjalankan *tax planning* tersebut harus didukung oleh berbagai komponen dalam perusahaan yang dikelola dengan tetap. “Secara teoritis hampir semua manajer keuangan setuju terhadap tujuan memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya, mereka juga berkepentingan terhadap kemakmuran individu, keselamatan kerja, gaya hidup, dan keuntungan yang lainnya.” (Sartono, 2001: 10). Menurut Tertius dan Christiawan (2015:225): “Meski terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen, masing-masing pihak harus dapat berkomitmen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.” Dalam praktiknya, manajer sebagai pelaksana operasional perusahaan lebih memahami kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemiliknya sehingga berpeluang untuk melakukan suatu perilaku

---

*oportunistis*. Menurut Mahsiwari dan Nugroho (2014:3):” Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan keagenan adalah dengan menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” Penerapan GCG yang dilakukan oleh suatu perusahaan bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen.

Menurut Sutedi (2012: 41-42):

“Konsep GCG pada intinya adalah pertama, *internal balance* antar organ perusahaan RUPS, Komisaris, dan direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut. Kedua, *external balance*, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholder*.”

Secara singkat ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut jika diterapkan dengan baik dan konsisten dapat mencegah aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan dimana rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. *Good Corporate governance* atau tata kelola yang baik untuk perusahaan juga harus dapat mendukung aspek manajemen pajak dimana manajemen puncak mendukung bukan hanya dengan mulut saja tetapi dengan menerapkan aturan sesuai dengan perencanaan pajak yang sudah disepakati.

Menurut Sutedi (2012: 01):

“*Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Unsur-unsur dalam *good corporate governance* ada bermacam-macam dimana

Menurut Sutedi (2012: 41-42):

“Terdapat unsur-unsur *Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan serta unsur-unsur yang ada diluar perusahaan yang bisa menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance*. Unsur-unsur yang berada di dalam

---

perusahaan meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan serikat pekerja, sistem remunerasi berdasarkan kinerja, komite audit. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan antara lain keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*), transparansi, *accountability*, *fairness*, aturan dari *code of conduct*. Sedangkan Unsur-unsur dari luar perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi jaminan, lembaga yang mengesahkan legalitas. Unsur-unsur yang diperlukan perusahaan antara lain meliputi: Aturan dari *code of conduct*, *fairness*, *accountability*, jaminan hukum.”

Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada 4 buah variabel yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance* yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan jumlah komite audit.

Menurut Louw (2011):

“Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga. Persentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.”

Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan tingginya persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dalam suatu perusahaan akan menciptakan pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen sehingga akan meminimalkan perilaku oportunistis yang dilakukan oleh manajer. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan semakin sulit melakukan manajemen pajak di dalam perusahaan sehingga dapat disimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak di mana didukung dengan hasil penelitian oleh Merlslythalia dan Lasmana (2016).

Proporsi komisaris independen merupakan persentase jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan. (Tertius dan Christiawan, 2015: 225). Menurut Samsul (2006: 72) “Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Dalam suatu perusahaan harus terdapat sekurang-kurangnya tiga puluh persen komisaris independen.” Tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi baik secara umum maupun secara khusus sesuai dengan dasar Rapat

---

Umum Pemegang Saham. Menurut Sutedi Komisaris independen dalam suatu perusahaan akan berperilaku secara objektif dan independen sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap dewan direksi akan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Komisaris independen dihadirkan di dalam organisasi untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan oleh dewan komisaris, di mana kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat. Menurut Suryanto dan Supramono (2012:169): “semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat.” Pengawasan dan kontrol yang baik akan meminimalkan tindak *oportunistis* yang akan dilakukan oleh pihak manajemen sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik manajemen pajak di dalam perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) dan Diantasari dan Ulupui (2016).

Komisaris merupakan orang bayaran, yang dipilih melalui rapat umum pemegang saham untuk menjalankan strategi perusahaan dan mengawasi kinerja direksi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 108 ayat 3, suatu perusahaan memiliki dewan komisaris yang terdiri dari satu orang anggota atau lebih. Menurut Muh. Arief Ujijantho dan Bambang Agus Pramuka (2007:10) “Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan“ Dewan komisaris mempunyai fungsi pengawasan, mereka berhak untuk mengawasi dan memberikan saran kepada direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Sedangkan menurut Wardhani (2007:99): “Kerugian dari jumlah dewan komisaris yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris dan turunnya kemampuan mereka untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol”. Dewan komisaris berbentuk majelis, sehingga mereka tidak dapat bertindak sendirian. Semakin tinggi ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan kualitas pengawasan yang semakin tinggi terhadap kinerja dewan direksi. Pengawasan yang baik akan meminimalkan tindak *oportunistis* yang akan dilakukan oleh dewan

---

direksi sehingga akan mempengaruhi manajemen pajak secara negatif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010).

Menurut Samsul (2006: 72): Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat yang minimal terdiri dari 3 orang.

Menurut Samsul (2006: 72-73):

Komite audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
3. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.
4. Menelaah efektivitas pengendalian internal perusahaan.
5. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi.

Menurut Nasution dan Setiawan (2007:7): “komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan” Komite audit yang semakin banyak akan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak karena Komite audit dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses akuntansi dan keuangan perusahaan sehingga akan meminimalkan perilaku oportunistis yang dilakukan oleh pihak keuangan dan akuntansi perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi ukuran komite audit akan semakin mengurangi kemungkinan terjadinya praktik manajemen pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016).

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Variabel Penilaian tingkat profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan variabel *Return on Equity*. Menurut Fidhayatin dan Dewi (2012: 206): “Rasio ini merupakan rasio profitabilitas dari pemegang saham, tingkat efisiensi perusahaan dapat diukur berdasarkan seberapa besar tingkat pengembalian modalnya,

---

karena hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modalnya.” Rasio ini menggambarkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga semakin besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba maka pajak yang harus dibayar juga semakin besar.

### **HIPOTESIS PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, terdapat hipotesis  $H_0$ ,  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ , dan  $H_4$ .  $H_0$  berarti variabel yang diteliti tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

$H_1$ : Terdapat pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak dengan mengendalikan variabel ROE.

$H_2$ : Terdapat pengaruh negatif proporsi komisaris independen terhadap manajemen pajak dengan mengendalikan variabel ROE.

$H_3$ : Terdapat pengaruh negatif jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak dengan mengendalikan variabel ROE.

$H_4$ : Terdapat pengaruh negatif jumlah komite audit terhadap manajemen pajak dengan mengendalikan variabel ROE.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah Sembilan puluh delapan Perusahaan Sektor Jasa di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling*.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen pajak yang digambarkan dengan CETR, sedangkan variabel independen yang digunakan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, jumlah komite audit, dan persentase komisaris independen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis regresi linear berganda, analisis korelasi parsial, koefisien determinasi, uji F dan uji t dengan menggunakan program software SPSS (*Statistic Product and Service Solutions*) versi 20.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak dengan *Return on Equity* sebagai Variabel Kontrol

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi sehingga penelitian ini layak diteliti. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengukur hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

#### a. Analisis Regresi Berganda

**TABEL 1**  
**ANALISIS REGRESI**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.435	.082		5.339	.000		
INST	.044	.041	.049	1.068	.286	.951	1.052
INDEP	-.039	.066	-.027	-.589	.556	.924	1.082
BOARD	.051	.017	.145	2.951	.003	.818	1.223
AUDT	.012	.039	.015	.303	.762	.855	1.169
ROE	-.246	.059	-.191	-4.136	.000	.918	1.089

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan Tabel 1 diatas, maka persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,435 + 0,044\text{INST} - 0,039\text{INDEP} + 0,051\text{BOARD} + 0,012\text{AUDT} - 0,246\text{ROE} + e$$

Adapun persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta 0,435 artinya bahwa jika tidak ada variabel independen atau bernilai 0 maka nilai *Cash Effective Tax Rate* adalah sebesar 0,435.
2. Koefisien regresi INST sebesar 0,044 menyatakan bahwa setiap peningkatan Kepemilikan Institusional sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan kenaikan nilai *Cash Effective Tax Rate* sebesar 0,044 satuan dengan catatan variabel independen lain dianggap konstan.
3. Koefisien regresi INDEP sebesar 0,039 menyatakan bahwa setiap kenaikan Komisaris Independen sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan nilai *Cash Effective Tax Rate* sebesar 0,039 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.



4. Koefisien regresi BOARD sebesar 0,051 menyatakan bahwa setiap peningkatan Ukuran Dewan Komisaris sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan kenaikan nilai *Cash Effective Tax Rate* sebesar 0,051 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
5. Koefisien regresi AUDT sebesar 0,012 menyatakan bahwa setiap peningkatan Komite Audit sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan kenaikan nilai *Cash Effective Tax Rate* sebesar 0,012 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
6. Koefisien regresi ROE sebesar -0,246 menyatakan bahwa setiap peningkatan *Return On Equity* sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan nilai *Cash Effective Tax Rate* sebesar 0,246 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

b. Uji Koefisien Korelasi Parsial

**TABEL 2**  
**KOEFISIEN KORELASI PARSIAL**

			Correlations				
Control Variables			CETR	INST	INDEP	BOARD	AUDT
ROE	CETR	Correlation	1.000	.064	-.053	.154	.060
		Significance (2-tailed)	.	.158	.243	.001	.187
		df	0	487	487	487	487
INST	INST	Correlation	.064	1.000	-.134	.072	.097
		Significance (2-tailed)	.158	.	.003	.110	.032
		df	487	0	487	487	487
INDEP	INDEP	Correlation	-.053	-.134	1.000	-.146	.126
		Significance (2-tailed)	.243	.003	.	.001	.005
		df	487	487	0	487	487
BOARD	BOARD	Correlation	.154	.072	-.146	1.000	.310
		Significance (2-tailed)	.001	.110	.001	.	.000
		df	487	487	487	0	487
AUDT	AUDT	Correlation	.060	.097	.126	.310	1.000
		Significance (2-tailed)	.187	.032	.005	.000	.
		df	487	487	487	487	0

Sumber: Output SPSS 20

Dari hasil analisa pada tabel 2 diatas diperoleh korelasi antara variabel kepemilikan institusional dengan variabel *CETR* dengan mengontrol variabel *ROE* sebesar 0,064 sehingga dapat disimpulkan koefisien korelasi antara kepemilikan institusional dan *CETR* dengan mengontrol variabel *ROE* memiliki hubungan yang kurang berarti dan positif. Dari hasil analisa pada tabel 2 diatas korelasi antara variabel kepemilikan institusional dan variabel *CETR* dengan mengontrol

variabel *ROE* sebesar -0,053 sehingga dapat disimpulkan korelasi antara persentase komisaris independen dengan *CETR* dengan mengontrol variabel *ROE* memiliki hubungan yang kurang berarti dan negatif. Dari hasil analisa pada tabel 2 diatas korelasi antara variabel kepemilikan institusional dan variabel *CETR* dengan mengontrol variabel *ROE* sebesar 0,154 sehingga dapat disimpulkan korelasi antara ukuran dewan komisaris dengan *CETR* dengan mengontrol variabel *ROE* memiliki hubungan yang lemah dan positif. Dari hasil analisa pada tabel 2 diatas korelasi antara variabel jumlah komite audit dan variabel *CETR* dengan mengontrol variabel *ROE* sebesar 0,060 sehingga dapat disimpulkan korelasi antara jumlah komite audit dengan *CETR* dengan mengontrol variabel *ROE* memiliki hubungan yang kurang berarti dan positif.

c. Uji Koefisien Korelasi Determinasi

**TABEL 3**  
**KOEFISIEN KORELASI DETERMINASI**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.222 <sup>a</sup>	.049	.039	.15713	.049	4.996	5	484	.000	2.016

a. Predictors: (Constant), ROE, INDEP, AUDT, INST, BOARD

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan pada hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 3 diatas dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0,049 atau 4,9 persen. Hal ini berarti persentase sumbangan pengaruh *Good Corporate Governance*, terhadap *Cash Effective Tax Rate* dengan *Return On Equity* sebagai variabel kontrol adalah sebesar 4,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 95,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

d. Uji Hipotesis

1) Uji F

**TABEL 4**  
**HASIL UJI F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.617	5	.123	4.996	.000 <sup>b</sup>
	Residual	11.949	484	.025		
	Total	12.566	489			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), ROE, INDEP, AUDT, INST, BOARD

Sumber: Output SPSS 20

---

Berdasarkan hasil *output* perhitungan uji F yang ditampilkan pada Tabel 4 diatas, didapatkan tingkat signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian layak untuk diujikan.

## 2) Uji t

Berdasarkan output uji t yang ditampilkan pada Tabel 2 diatas, dapat diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,158. Nilai signifikansi 0,158 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak dengan mengendalikan variabel ROE. Berdasarkan output perhitungan uji t yang ditampilkan pada Tabel 2 diatas, dapat diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,243. Nilai signifikansi 0,243 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak dengan mengendalikan variabel ROE. Berdasarkan output perhitungan uji t yang ditampilkan pada Tabel 2 diatas, dapat diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak dengan mengendalikan variabel ROE. Berdasarkan output perhitungan uji t yang ditampilkan pada Tabel 2 diatas, dapat diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,187. Nilai signifikansi 0,187 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian berdasarkan hasil uji t menunjukkan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak dengan mengendalikan variabel ROE.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan mengendalikan variabel *return on equity* pada perusahaan sektor jasa Adapun saran yang diberikan kepada penulis selanjutnya pada perusahaan sektor jasa dalam mempertimbangkan penggunaan variabel GCG dengan menggunakan *Corporated*

---

*Governance Perception Index (CGPI)* dimana pengukuran GCG dilakukan dengan memberikan skor dan peringkat peringkat penerapan GCG pada perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fidhayatin, Septy Kurnia dan Nurul Hasanah Uswati Dewi. 2012 “Analisis Nilai Perusahaan, Kinerja Perusahaan dan Kesempatan Bertumbuh Perusahaan Terhadap *Return Saham* pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI.” *The Indonesian Accounting Review*, vol.2, no.2, hal.203-214.
- Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono. 2012 “Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan” *Jurnal keuangan dan perbankan*, vol 16, no 2, hal. 167-177.
- Louw. Febriana. 2011. “Kajian Corporate Governance dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Property & Real Estate” *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Pontianak (MABIS)*, vol. 3, no. 2, hal. 108-124.
- Pohan, C.A. *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marihot Nasution, dan Doddy Setiawan. 2007. Simposium Nasional Akuntansi unhas Makasar.”Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di industri Perbankan Indonesia”
- Melia Agustina Tertisu dan Yulius jogi Christiawati. 2015 “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan” *Business Accounting Review*, vol 3, no 1, hal. 167-177.
- Muh A. Ujiyantho, dan Bambang A. Pramuka. 2007. “Simposium Nasional Akuntansi unhas Makasar.”Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”.
- Pohan, C.A. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raras Mahiswari dan Paskah Ika Nugroho.2014.Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Samsul, Mohammad. 2006. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Wardhani. Ratna. 2007. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. “Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan”

www.idx.co.id